



# KUPA-PPAS Perubahaan APBD Tahun Anggaran 2024 Disepakati

## Sesuaikan Dinamika dan Perkembangan Situasi

**KUBU RAYA, SP** - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kubu Raya sepakat menandatangani Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

KUPA-PPAS ditandatangani PJ Bupati Syarif Kamaruzaman bersama ketua

DPRD Kubu Raya Agus Sudarmansyah pada saat rapat paripurna di kantor DPRD, Selasa, (6/8).

Pj Bupati Syarif Kamaruzaman mengatakan jika nota kesepakatan merupakan hasil dari pembahasan bersama eksekutif dan legislatif sekaligus menjadi wujud nyata kemitraan yang harmonis antara pemerintah kabupaten dan DPRD.

"KUPA-PPAS untuk

tahun anggaran 2024 ini merupakan arah umum kebijakan anggaran dari pemerintah daerah dalam konteks perubahan," kata Kamaruzaman.

Kamaruzaman menjelaskan perubahan anggaran dilakukan karena dalam masa penganggaran di tahun 2024 ada dinamika dan perkembangan situasi yang terjadi, baik dalam konteks penerimaan keuan-

gan daerah maupun hal-hal lainnya.

"Sehingga memang APBD itu harus dilakukan perubahan dalam konteks penataan belanja-belanja daerah," ujarnya.

Kamaruzaman menuturkan yang ditandatangani eksekutif dan legislatif adalah nota kesepakatan.

"Belum peraturan daerah. Baru nota kesepakatan

kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara," terangnya.

Sebelumnya Kamaruzaman menjelaskan bahwa perubahan anggaran diperlukan untuk menanggapi berbagai kondisi yang berkembang selama pelaksanaan APBD Tahun 2024.

"Pengajuan perubahan anggaran ini mempertimbangkan kondisi kemam-

puan fiskal daerah, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas, dan permasalahan aktual yang mempengaruhinya."

Kamaruzaman juga mengungkapkan bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi hingga triwulan kedua tahun 2024, pemerintah kabupaten merasa perlu melakukan perubahan.

Tujuannya adalah un-

tuk memperbarui asumsi-asumsi umum dalam APBD Tahun Anggaran 2024, termasuk proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan.

"Perubahan ini juga akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," jelas Kamaruzaman. (mar)